



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri KPPPA RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 13 Januari 2021.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 2. Membahas Isu – Isu Aktual
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 45 dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 5 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri KPPPA RI Beserta Jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.11 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh WaKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. dengan didampingi Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

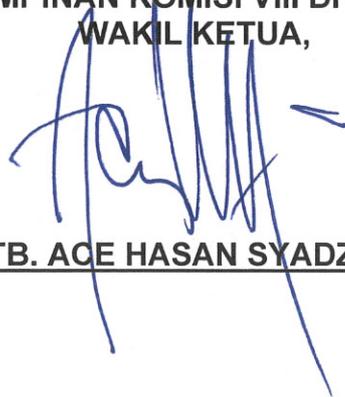
1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan tentang evaluasi pelaksanaan APBN Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020 dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.199.480.957.716,-** (*seratus sembilan puluh Sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enambelas rupiah*) sama dengan **98,03 persen**, dari pagu anggaran sebesar **Rp.203.487.939.000,-** (*dua ratus tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*), selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyampaikan laporan program dan anggaran Tahun 2020 secara lebih rinci.
2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI terhadap capaian strategis Tahun 2020 dan harus dipertahankan serta disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 pada tahun berikutnya.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan serta Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait yang berdampak langsung dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - b. Mendorong Kementerian untuk melakukan kajian terhadap formasi kelembagaan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tupoksinya terutama dalam memprioritaskan anggaran ke deputian
  - c. Memperkuat prioritas program berbasis anggaran yang berdampak signifikan bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan
  - d. Mendorong peningkatan pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di setiap Kabupaten/Kota
  - e. Memperkuat kerjasama dengan Instansi/Lembaga terkait dalam upaya pencegahan untuk penurunan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

4. Komsis VIII DPR RI meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk peningkatan anggaran Kementerian.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**



**DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.**